

## EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI *E-PROCUREMENT* DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN MAGELANG

Desiana Kartika Dewi<sup>1</sup>, Dr. Bambang Kuncoro, M.Si.<sup>2</sup>, RM. Mahendrati, SH., M.Si<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116, Telp. (0293) 364113, Fax. (0293) 362438 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL, UNTIDAR, Magelang

Email: [ddesiana13@gmail.com](mailto:ddesiana13@gmail.com)

<sup>2</sup>Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL, UNTIDAR, Magelang  
e-mail: [bkun@ymail.com](mailto:bkun@ymail.com)

<sup>3</sup>Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL, UNTIDAR, Magelang  
e-mail: [dadiiek.mahendrati@yahoo.co.id](mailto:dadiiek.mahendrati@yahoo.co.id)

---

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang dan mengetahui efektivitas dan efisiensi *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa. Permasalahannya Kabupaten Magelang ketika menggunakan lelang konvensional memberi dampak negatif, seperti pengaturan hasil lelang di luar adanya tindakan pencegahan yang dilakukan oleh antar penyedia, kemudian setelah adanya *e-procurement* ini diharapkan memberikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang yang efektif dan efisien.

Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang. Pengumpulan data penelitian ini adalah observasi langsung, dokumentasi dan wawancara.

Proses *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang sesuai dengan mekanisme dan prosedur pelaksanaan yang tercantum pada peraturan perundang-undangan. Efektivitas *e-procurement* pada pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang ditunjukkan dengan sedikit terjadinya proses gagal lelang yaitu 8,5% dari seluruh jumlah proses lelang yang dilaksanakan. Efisiensi *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang yaitu efisiensi terhadap pagu 17% dengan nominal Rp 80.553.703.637 dan efisiensi terhadap HPS adalah 15% dengan nominal Rp 67.732.361.487.

*E-procurement* pada proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang telah efektif dan efisien. Pemerintah Kabupaten Magelang melaksanakan *e-procurement* pada proses pengadaan barang/jasa harus mempertahankan apa yang ditunjukkan mengenai efektivitas dan efisiensinya.

Keyword: efektivitas, efisiensi, *e-procurement*, pengadaan

---

### 1. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk pelaksanaan *e-government* adalah pengadaan barang/jasa secara elektronik atau yang biasa disebut dengan *e-procurement*. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat

Daerah/Intitusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Penelitian ini akan menganalisis pelaksanaan *e-procurement* sebagai media *e-government* untuk menciptakan *good governance* khususnya pada bidang pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Magelang.

Pada saat Kabupaten Magelang masih menggunakan lelang konvensional di duga terdapat adanya pengaturan hasil lelang di

luar oleh penyedia dan adanya tindakan pencegahan yang dilakukan oleh antar penyedia. Kemudian pada saat pelaksanaan *e-procurement* terdapat fenomena bahwa masih terdapat adanya ketergantungan sistem dari pusat ketika terdapat permasalahan pengadaan karena dalam pengadaan tersebut banyak pengadaan yang datang dari berbagai daerah sehingga tanggapan pengadaan yang diharapkan tidak terproses sesuai dengan waktu yang diharapkan. Adanya *e-procurement* ini diharapkan mampu memberikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang yang lebih efektif dan efisien dan menghilangkan fenomena-fenomena buruk yang terjadi di Kabupaten Magelang. Hasil penelitian di beberapa daerah dan fenomena yang terjadi di Kabupaten Magelang mendorong penulis untuk menganalisis penerapan *e-procurement* di Kabupaten Magelang apakah sudah berjalan efektif dan efisien sebagai upaya terselenggaranya *good governance* di pemerintah Kabupaten Magelang yaitu proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Magelang kepada masyarakat umum dalam konteks ini adalah pihak swasta.

*E-procurement* dalam prosesnya perlu dikaji apakah telah mewujudkan penyelenggaraan *good governance* yang memiliki indikasi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang sudah menjadi tujuan awal dari *e-government* sebagai penjembitan pelaksanaannya. Masyarakat berhak

mengetahui proses pelelangan barang/jasa melalui adanya *e-procurement* agar *e-procurement* benar-benar berjalan efektif dan efisien yaitu harus selalu terpantau mulai dari pengusaha yang memasukkan penawaran, kemudian siapa yang menjadi pemenang dan hal terpenting yaitu mengetahui jumlah penawarannya dan rata-rata selisih penawarannya dengan seluruh pesaingnya.

*E-procurement* yang telah dilaksanakan di beberapa daerah tidak dipungkiri memberikan informasi mengenai pelaksanaan *e-procurement* yang belum maksimal karena masih ditemukannya beberapa indikasi yang tidak dapat mencapai titik optimal yang diharapkan. Fenomena ini menjadikan petunjuk bagi penulis untuk membuktikan apakah *e-procurement* sebagai bagian dari media telah berhasil menciptakan bentuk layanan *e-government* yang ideal dan terwujudnya *good governance* yang digadang-gadang mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

Berangkat dari permasalahan yang diuraikan sebelumnya, maka pertanyaan yang dapat dilontarkan yaitu: Bagaimana proses *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang? dan seberapa jauh efektivitas dan efisiensi *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. *E-Government*

Terminologi *e-government* dapat diartikan sebagai kumpulan konsep untuk semua tindakan dalam sektor publik (baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengoptimalkan proses pelayanan publik yang efisien, transparan dan efektif. (Kurniawan, dalam Hardiyansyah 2011 : 107).

## 2.2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Intitusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

## 2.3. Efektivitas dan Efisiensi

Salim dan Woodward mengartikan efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. (Hardyansyah, 2011:52).

Richard M. Steers mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas. 3 indikator tersebut adalah:

### 1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

### 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan consensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

### 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan. (Tangkilisan, 2005:64)

Salim dan Woodward mengartikan efisiensi adalah suatu keadaan yang menunjukkan tercapainya perbandingan terbaik antara masukan dan keluaran dalam suatu penyelenggaraan pelayanan publik. (Hardyansyah, 2011:52).

Kost dan Rosenwig mengatakan ada tiga kondisi dapat dikatakan tercapainya efisiensi yaitu:

1. Apabila dengan menggunakan input yang sama, dapat menghasilkan output yang lebih besar;
2. Dengan menggunakan input yang lebih kecil bisa menghasilkan output yang sama;
3. Dengan menggunakan input yang besar menghasilkan pula output yang lebih besar. (Kost dan Rosenwig, 1979:41).

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Magelang. Sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang, maka instansi lokasi penelitian ini adalah di Kantor Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang. Fokus kajian yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini difokuskan pada keefektifan dan keefisienan *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang. Analisis data yang digunakan adalah menurut B.Miles dan Michel A Huberman, terdiri dari alur kegiatan sesuai yang saling menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data. Alur kegiatan tersebut terdiri reduksi data, penyajian data, penarikan

kesimpulan/verifikasi. (Miles dan Huberman 1992:16).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Proses *E-Procurement* dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang telah melaksanakan pengadaan barang/jasa di tahun 2017 pada kurun waktu kurang lebih satu tahun dengan sejumlah paket lelang, untuk mengetahui jumlah paket yang telah dilaksanakan, penulis akan menyajikan data rekapitulasi proses pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kabupaten Magelang data per tanggal 28 Desember 2017 dijelaskan pada tabel 4.1 bahwa jumlah paket lelang menurut jenis pengadaannya terdapat pengadaan barang sejumlah 40 paket, pengadaan konstruksi 176 paket, pengadaan jasa konsultansi 16 paket, dan pengadaan jasa lainnya 3 paket dengan jumlah seluruh paket yang dilaksanakan di tahun 2017 oleh Kabupaten Magelang adalah 235 paket.

Tabel 4.1. Tabel Jumlah Paket Lelang

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang

*E-procurement* sebagai bagian dari *e-government* yang memberikan pelayanan yang efektif dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang dan efisien dalam menekan anggaran dan

penggunaan waktu. Pelaksanaan *e-procurement* dalam proses pengadaan

No	Jenis Pengadaan	Jumlah Peaket
1	pengadaan barang	40
2	pengadaan konstruksi	176
3	pengadaan jasa konsultansi	16
4	pengadaan jasa lainnya	3
	Jumlah	235

barang/jasa telah meminimalisir terjadinya pertemuan secara langsung antara penyedia dengan panitia maupun antara penyedia dengan penyedia lainnya. Oleh sebab itu *e-procurement* telah menghilangkan fenomena dimana pada lelang konvensional terdapat adanya pengaturan hasil lelang di luar dan adanya tindakan pencegahan yang dilakukan oleh antar penyedia.

#### 4.2. Efektivitas *E-procurement* dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Magelang

Hasil penelitian mengenai efektivitas *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang terdapat kendala yang berupa adanya ketergantungan dengan sistem di pusat dalam menanggapi pengaduan yang datang dari berbagai daerah, hal tersebut mengakibatkan tanggapan mengenai pengaduan yang ada tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan. Pada hal ini diharapkan LKPP harus memperbaiki tingkat layanannya ke daerah-daerah dan apabila LKPP yang hanya ada di pusat tidak mampu, dapat diberlakukan adanya perwakilan LKPP yang ada di setiap provinsi agar dapat membantu meningkatkan pelayanan dan

memberikan tanggapan terhadap pengaduan yang ada di daerahnya masing-masing.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang terdapat fenomena bahwa Kantor dari satu unit dengan unit lain yang memiliki salah satu tugas pokok dan fungsinya dalam pengadaan barang/jasa masih terpisah-pisah. Hal tersebut dianggap merepotkan dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang. Fenomena tersebut seharusnya dapat dihilangkan dengan menyatukan seluruh unit yang berhubungan sesuai dengan fungsinya dalam pengadaan barang/jasa dapat dijadikan dalam satu wadah yang membentuk satu unit baru yang di dalamnya terdapat seluruh unit yang bersangkutan dengan segala sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang.

Indikator efektivitas pada bab ini digunakan untuk menganalisis *e-procurement* dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di kabupaten Magelang. Indikator dalam efektivitas yang digunakan adalah menurut Richard M. Steers. 3 indikator tersebut adalah:

##### 1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun

pentahapan dalam arti perodesasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

## 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan consensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

## 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan. (Tangkilisan, 2005:64).

Menganalisis efektivitas *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang berdasarkan indikator yang pertama bahwa tujuan dari diselenggarakannya *e-procurement* di Kabupaten Magelang adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di seluruh Indonesia dengan pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan tersebut.

Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret. Sub indikator yang pertama yaitu kurun waktu dapat dikatakan sesuai dengan keadaan pelaksanaan *e-procurement* dalam pengadaan

barang/jasa di Kabupaten Magelang ketika Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah muncul, Pemerintah Kabupaten Magelang juga mulai berupaya untuk mengikuti pelaksanaan yang diinginkan peraturan tersebut yaitu dengan memulai uji coba pelaksanaan pengadaan barang jasa elektronik atau *e-procurement* pada tahun 2011 kemudian percobaan tersebut terus dilakukan hingga pada tahun 2012 kemudian seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang telah dilaksanakan menggunakan *e-procurement* hingga saat ini.

Sub-indikator yang kedua adalah sasaran yang merupakan target kongkret. Pemerintah Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan *e-procurement* telah mengupayakan agar tidak terjadi gagal lelang, hingga per tanggal 28 Desember 2017 jumlah keseluruhan paket lelang dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang terdapat 235 paket, dengan terselesaikannya proses lelang 212 paket, dan terdapat gagal lelang 20 paket yaitu 8,5% dari jumlah paket lelang, dan kondisi paket lelang yang ditarik SKPD sejumlah 3 paket. Hal tersebut sudah memenuhi indikator dari pencapaian tujuan dan sub-indikator sasaran yang merupakan target kongkret.

Indikator efektivitas yang kedua adalah integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan consensus. Integrasi

menyangkut proses sosialisasi. Pada masa transisi dari lelang konvensional menuju *e-procurement*, pemerintah Kabupaten Magelang telah melaksanakan sosialisasi baik kepada panitia dan penyedia, sosialisasi dilaksanakan dengan memberikan rambu-rambu secara umum. Kemudian pada aplikasi LPSE memberikan ruang tanya jawab dan kontak yang terhubung langsung dengan panitia untuk masyarakat umum dan pihak penyedia barang/jasa apabila terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan dan forum tersebut hingga saat ini telah dipergunakan sesuai fungsinya

Indikator efektivitas yang ketiga adalah adaptasi yang diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan. Indikator tersebut sangat berkaitan dengan kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang pada pelaksanaan *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang, kondisi sumber daya manusia yang ada pada pihak panitia sudah sangat memenuhi karena pegawai yang direkrut adalah pegawai yang paham dengan teknologi informasi dan komunikasi kemudian sarana prasarana yang sangat berpengaruh adalah jaringan internet dimana pada seluruh lokasi masing-masing SKPD telah memiliki jaringan internet dan telah terdapat perencanaan penambahan jaringan

internet yang dibutuhkan sesuai dengan penggunaan.

Penyedia barang/jasa berdasarkan hasil wawancara mengungkapkan bahwa kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada memiliki kondisi kualitas yang dapat menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-procurement* ini.

*E-procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang telah berjalan efektif yang ditunjukkan dari terpenuhinya seluruh indikator efektivitas menurut Richard M. Steers terhadap kondisi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang.

#### 4.3. Efisiensi *E-procurement* dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Magelang

Hasil penelitian mengenai efisiensi *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang terdapat kendala yang berupa adanya keterlambatan pelimpahan dan keterlambatan penayangan dokumen dalam perencanaan pengadaan barang/jasa hal tersebut memungkinkan terjadinya keterlambatan dimulainya pelaksanaan lelang. Kondisi tersebut dapat disiasati dengan meningkatkan koordinasi antara pengguna anggaran dengan panitia pengadaan hal tersebut dapat dibantu dengan pendekatan personal antara panitia dengan masing-masing pengguna anggaran agar proses koordinasi dapat berjalan dengan baik.

Kemudian untuk menghindari keterlambatan penayangan dokumen, antara panitia pengadaan harus meningkatkan intensitas koordinasi dan tertib serta konsisten dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Pada hal ini pemberian jadwal yang teratur juga harus diberlakukan dalam pelaksanaan perencanaan pengadaan agar berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan tidak terdapat keterlambatan dalam proses perencanaan pengadaan.

Indikator efisiensi pada bab ini digunakan untuk menganalisis *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa di kabupaten Magelang. Menurut Kost dan Rosenwig ada tiga kondisi dapat dikatakan tercapainya efisiensi yaitu:

1. Apabila dengan menggunakan input yang sama, dapat menghasilkan output yang lebih besar
2. Dengan menggunakan input yang lebih kecil bisa menghasilkan output yang sama
3. Dengan menggunakan input yang besar menghasilkan pula output yang lebih besar.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-procurement* sebagai salah satu bagian dari *e-government* dimana memberikan salah satu manfaat dari *e-government* yaitu mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan hasil

temuan mengatakan bahwa kondisi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya menekan anggaran terdapat efisiensi terhadap pagu 17% dengan nominal Rp 80.553.703.637 dan efisiensi terhadap HPS adalah 15% dengan nominal Rp 67.732.361.487. Kemudian pihak penyedia mengungkapkan bahwa *e-procurement* membantu dalam meminimalisir data-data yang terbuang dan interaksi langsung antara pihak panitia dan pihak penyedia sudah dibatasi karena seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan teknologi informasi.

Waktu yang dibutuhkan dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang telah tersusun di dalam jadwal tahap lelang dimana seluruh pelaksanaan dilakukan berpedoman tepat menurut jadwal yang telah disepakati antara panitia dan pihak penyedia, hal tersebut menunjukkan bahwa proses *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang dapat berlangsung singkat karena sesuai dengan jadwal yang ada.

Kondisi tersebut tercakup dalam kondisi yang dapat dikatakan tercapainya efisiensi menurut Kost dan Rosenwig yaitu apabila dengan menggunakan input yang sama, dapat menghasilkan output yang lebih besar.

Hasil penelitian mengenai efisiensi *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang terdapat kendala yang berupa adanya keterlambatan

pelimpahan dan keterlambatan penayangan dokumen dalam perencanaan pengadaan barang/jasa hal tersebut memungkinkan terjadinya keterlambatan dimulainya pelaksanaan lelang. Kondisi tersebut dapat disiasati dengan meningkatkan koordinasi antara pengguna anggaran dengan panitia pengadaan hal tersebut dapat dibantu dengan pendekatan personal antara panitia dengan masing-masing pengguna anggaran agar proses koordinasi dapat berjalan dengan baik. Kemudian untuk menghindari keterlambatan penayangan dokumen, antara panitia pengadaan harus meningkatkan intensitas koordinasi dan tertib serta konsisten dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Pada hal ini pemberian jadwal yang teratur juga harus diberlakukan dalam pelaksanaan perencanaan pengadaan agar berjalan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan tidak terdapat keterlambatan dalam proses perencanaan pengadaan.

Indikator efisiensi pada bab ini digunakan untuk menganalisis *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa di kabupaten Magelang. Menurut Kost dan Rosenwig ada tiga kondisi dapat dikatakan tercapainya efisiensi yaitu:

1. Apabila dengan menggunakan input yang sama, dapat menghasilkan output yang lebih besar.
2. Dengan menggunakan input yang lebih kecil bisa menghasilkan output yang sama.

3. Dengan menggunakan input yang besar menghasilkan pula output yang lebih besar.

Pengadaan barang/jasa secara elektronik atau *e-procurement* sebagai salah satu bagian dari *e-government* dimana memberikan salah satu manfaat dari *e-government* yaitu mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan hasil temuan mengatakan bahwa kondisi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam upaya menekan anggaran terdapat efisiensi terhadap pagu 17% dengan nominal Rp 80.553.703.637 dan efisiensi terhadap HPS adalah 15% dengan nominal Rp 67.732.361.487. Kemudian pihak penyedia mengungkapkan bahwa *e-procurement* membantu dalam meminimalisir data-data yang terbuang dan interaksi langsung antara pihak panitia dan pihak penyedia sudah dibatasi karena seluruh pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan teknologi informasi.

Waktu yang dibutuhkan dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang telah tersusun di dalam jadwal tahap lelang dimana seluruh pelaksanaan dilakukan berpedoman tepat menurut jadwal yang telah disepakati antara panitia dan pihak penyedia, hal tersebut menunjukkan bahwa proses *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang dapat

berlangsung singkat karena sesuai dengan jadwal yang ada.

Kondisi tersebut tercakup dalam kondisi yang dapat dikatakan tercapainya efisiensi menurut Kost dan Rosenwig yaitu apabila dengan menggunakan input yang sama, dapat menghasilkan output yang lebih besar.

## 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan pada penelitian efektivitas dan efisiensi *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang.

1. Proses pengadaan barang jasa di Kabupaten Magelang sebelum menggunakan *e-procurement* di duga terdapat adanya pengaturan hasil lelang di luar dan adanya tindakan pencegahan yang dilakukan oleh antar penyedia kemudian setelah adanya *e-procurement* fenomena tersebut sudah dapat diminimalisir. Pada saat ini pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan *e-procurement* di Kabupaten Magelang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut juga ditunjukkan dengan pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 sejumlah 235 paket lelang.
2. Efektivitas *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten

Magelang sudah efektif karena hingga saat ini aplikasi yang tersedia masih berjalan sesuai dengan fungsinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan pihak penyedia tanpa terbatas oleh waktu dan ruang serta dirasa cukup mudah dalam mengakses seluruh informasi yang ada pada proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang dan efektivitas juga ditunjukkan dengan sedikit terjadinya proses gagal lelang yaitu 20 paket dari seluruh jumlah 235 paket lelang yang dilaksanakan. Namun efektivitas *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang terdapat kendala yang berupa adanya ketergantungan dengan sistem di pusat dan terdapat fenomena bahwa kantor dari satu unit dengan unit lain yang memiliki salah satu tugas pokok dan fungsinya dalam pengadaan barang/jasa masih terpisah-pisah.

Efisiensi *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang sudah efisien karena terdapat penekanan anggaran yaitu efisiensi terhadap pagu 17% dengan nominal Rp 80.553.703.637 dan efisiensi terhadap HPS adalah 15% dengan nominal Rp 67.732.361.487. Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan lelang dengan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang berjalan singkat karena

dengan mengikuti sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Namun, efisiensi *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang terdapat kendala yang berupa adanya keterlambatan pelimpahan dan keterlambatan penayangan dokumen dalam perencanaan pengadaan barang/jasa.

## 5.2. Saran

Kesimpulan yang telah diuraikan di atas mendorong penulis untuk memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan efektifitas dan efisiensi *e-procurement* dalam proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Magelang.

1. Pemerintah pusat sebaiknya memiliki kebijakan untuk menyatukan seluruh unit yang berhubungan sesuai dengan fungsinya dalam pengadaan barang/jasa dapat dijadikan dalam satu wadah yang membentuk satu unit baru yang di dalamnya terdapat seluruh unit yang bersangkutan dengan segala sumber daya manusia dan sarana prasarana yang menunjang.
2. LKPP harus memperbaiki tingkat layanannya ke daerah-daerah yang dapat diberlakukan adanya perwakilan LKPP yang ada di setiap provinsi agar dapat membantu meningkatkan pelayanan dan memberikan tanggapan yang lebih cepat terhadap pengaduan yang ada di daerahnya masing-masing.

3. Meningkatkan koordinasi antara pengguna anggaran dengan panitia pengadaan hal tersebut dapat dibantu dengan pendekatan personal antara panitia dengan masing-masing pengguna anggaran agar proses koordinasi dapat berjalan dengan baik.
4. Meningkatkan intensitas koordinasi dan tertib serta konsisten dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh seluruh panitia pengadaan
5. Proses gagal lelang yang terjadi sudah semakin sedikit tetapi diharapkan proses gagal lelang tidak terjadi lagi hal tersebut dimungkinkan dengan adanya persaingan pasar yang lebih luas sehingga partisipasi penyedia meningkat lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Penerbit Gava Media: Yogyakarta.
- [2] Kost, Fremont and Rosenwig, Jarnes. 1979. *Organization and Management. A System and Contigency Approach*. McGraw-Hill Inc: United States.
- [3] Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisa Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. UI Press: Jakarta.
- [4] Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Grasindo: Jakarta.
- [5] Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- [6] Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Kabupaten Magelang.

